

## Urgensi Ideologi Negara Perspektif Foucault Yang Berkorelasi Dengan Sistem Pemerintah Indonesia di Era Kontemporer

**Intan Nuraeni<sup>1</sup>, Rizki Tirta Ramadhan<sup>2</sup>, Teti Saputri<sup>3</sup>, Danar Justio Peradi<sup>4</sup>,  
Andini Nurul Syahfitri<sup>5</sup>, Windi Putri Oktapiani**  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia  
intannuraeniii708@gmail.com<sup>1</sup>, rizkitirtaramadhan@gmail.com<sup>2</sup>, tetisaputri257@gmail.com<sup>3</sup>,  
dananarjustioperadi@gmail.com<sup>4</sup>, andininurul4978@gmail.com<sup>5</sup>, windiputrii@gmail.com<sup>6</sup>

### RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2024-07-02

Revised : 2024-07-05

Accepted: 2024-07-05

### KEYWORD

Pancasila, state ideology, Michel Foucault

### KATA KUNCI

Pancasila, ideologi negara, Michel Foucault

### ABSTRACT

*This study explores the role of state ideology, particularly Pancasila, in the Indonesian government system from Michel Foucault's perspective. Using a theoretical approach that emphasizes power and knowledge, this research examines how Pancasila, as a state ideology, functions not only as a normative foundation but also as a tool to regulate and control society through various dispersed mechanisms of power within social structures. The main findings of this study indicate that Pancasila influences various aspects of Indonesian society, including education, politics, economics, and international relations. Although Pancasila's values have been integrated into various policies and institutions, challenges in implementation and deviations from core values persist. This study suggests that a more dialogical, participative, and transparent approach is needed to strengthen the acceptance and implementation of Pancasila.*

### ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran ideologi negara, khususnya Pancasila, dalam sistem pemerintahan Indonesia dari perspektif Michel Foucault. Dengan menggunakan pendekatan teoritis yang menekankan pada kekuasaan dan pengetahuan, penelitian ini mengkaji bagaimana Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi tidak hanya sebagai dasar normatif tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui berbagai mekanisme kekuasaan yang tersebar dalam struktur sosial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk pendidikan, politik, ekonomi, dan hubungan internasional. Meskipun nilai-nilai Pancasila telah diintegrasikan ke dalam berbagai kebijakan dan institusi, tantangan dalam implementasi dan penyimpangan dari nilai-nilai dasar tetap ada. Penelitian ini menyarankan bahwa pendekatan yang lebih dialogis, partisipatif, dan transparan diperlukan untuk memperkuat penerimaan dan implementasi Pancasila.

## 1. Pendahuluan

Ideologi negara dan sistem pemerintahan merupakan dua aspek penting dalam sebuah negara yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Dalam konteks globalisasi dan dinamika politik yang terus berkembang, penting untuk memahami urgensi ideologi negara dari perspektif Foucault dan bagaimana hal ini berkorelasi dengan sistem pemerintahan Indonesia di era kontemporer. (Salamah, 2015)

Pemahaman akan ideologi negara dan sistem pemerintahan menjadi krusial dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan negara. Ideologi negara mencerminkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan yang dipegang oleh suatu negara, sementara sistem pemerintahan menentukan struktur kekuasaan dan mekanisme pengambilan keputusan. (Aliano & Adon, 2023) Dalam era kontemporer yang gejolak, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara ideologi negara dan sistem pemerintahan sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. (Noor, 2016)

Dalam kajian literatur, kontribusi Michel Foucault (Foucault et al., 2009) terhadap pemahaman ideologi negara dan kekuasaan menjadi sangat relevan. Pendekatannya yang kritis terhadap kekuasaan dan pengetahuan memberikan wawasan baru tentang bagaimana ideologi negara dipahami dan diimplementasikan dalam sistem pemerintahan. Keterkaitan antara ideologi negara dan sistem pemerintahan menjadi semakin kompleks dalam dinamika politik kontemporer. (Taum, 2020)

Ideologi negara perspektif Foucault, yang berfokus pada analisis hubungan kekuatan dan pengetahuan, telah menjadi subjek perdebatan dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia di era kontemporer. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, ideologi ini menawarkan perspektif yang lebih dalam dan kompleks mengenai bagaimana kekuatan dan pengetahuan mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan. Dalam jurnal ini, kita akan menjelajahi urgensi ideologi negara perspektif Foucault dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana keduanya berkorelasi dalam era kontemporer. (Dhona, 2019)

Dalam konteks Indonesia, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana urgensi ideologi negara dari perspektif Foucault dalam konteks sistem pemerintahan yang ada saat ini. Bagaimana ideologi negara yang dianut oleh pemerintah berkorelasi dengan struktur kekuasaan dan kebijakan publik yang diterapkan di era kontemporer?

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan urgensi ideologi negara dari perspektif Foucault dan mengidentifikasi korelasinya dengan sistem pemerintahan Indonesia di era kontemporer. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ideologi negara terhadap kebijakan publik dan struktur kekuasaan yang ada. Bagaimana konsep ideologi negara menurut perspektif Foucault? Bagaimana ideologi negara yang dianut oleh pemerintah Indonesia berkorelasi dengan sistem pemerintahan yang ada? Apa urgensi ideologi negara dalam konteks kebijakan publik di Indonesia?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang pentingnya ideologi negara dan bagaimana hal ini berkorelasi dengan sistem pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan publik dan pengembangan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat. Penelitian ini akan membatasi cakupan pada analisis ideologi negara dari perspektif Foucault dan korelasinya dengan sistem pemerintahan Indonesia di era kontemporer. Batasan penelitian juga mencakup fokus pada kebijakan publik yang terkait dengan ideologi negara dan struktur kekuasaan pemerintah. (Turama, 2014)

Konteks urgensi ideologi negara dari perspektif Foucault yang berkorelasi dengan sistem pemerintahan Indonesia di era kontemporer, penting untuk mempertimbangkan bagaimana ideologi negara memengaruhi kebijakan publik, struktur kekuasaan, dan kontrol sosial dalam suatu negara. Michel Foucault (Foucault et al., 2009), seorang filsuf Prancis yang terkenal dengan karyanya tentang kekuasaan dan pengetahuan, memandang ideologi sebagai instrumen yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. (Apriliyadi & Hendrix, 2021)

Dalam konteks Indonesia, sistem pemerintahan yang berlaku saat ini adalah sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup lima sila yang menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. (Tilaar, 2003) Namun, dalam era kontemporer, terdapat tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dan implementasi kebijakan yang sesuai dengan ideologi tersebut. Dalam perspektif Foucault, ideologi negara seperti Pancasila dapat dipahami sebagai alat kontrol sosial yang digunakan oleh pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan. Foucault menyoroti bagaimana ideologi negara dapat memengaruhi

tindakan individu, membatasi kebebasan, dan menciptakan struktur kekuasaan yang hierarkis.

Ideologi negara merupakan salah satu aspek fundamental yang mempengaruhi arah dan tujuan pemerintahan suatu negara. Di era kontemporer, ideologi negara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat (Salamah & Rokhyanto, 2020). Michel Foucault, seorang filsuf Prancis, menawarkan perspektif yang mendalam mengenai hubungan antara ideologi, kekuasaan, dan pengetahuan. Dalam konteks sistem pemerintahan Indonesia, perspektif Foucault ini sangat relevan dalam memahami bagaimana ideologi negara, khususnya Pancasila, berperan dalam mengatur dinamika pemerintahan dan masyarakat. Michel Foucault memandang ideologi negara sebagai suatu strategi yang digunakan untuk mempertahankan dan menguasai kekuasaan. Menurutnya, ideologi tidak hanya berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan tetapi juga sebagai alat untuk mengontrol dan mengatur masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, ideologi negara seperti Pancasila diwujudkan dalam konstitusi dan hukum yang menjadi dasar negara. Konstitusi dan hukum ini tidak hanya mengatur tata kelola pemerintahan tetapi juga perilaku masyarakat, menjadikannya instrumen kekuasaan yang efektif dalam mencapai kestabilan dan ketertiban (Yudhanegara, 2016).

Dalam analisis Foucault, kekuasaan bukanlah sesuatu yang hanya dimiliki oleh negara atau penguasa, tetapi juga tersebar di seluruh struktur sosial. Kekuasaan bekerja melalui berbagai mekanisme dan institusi, seperti pendidikan, kesehatan, dan media, yang membentuk dan mengatur perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks ini, ideologi negara berperan sebagai wacana yang memproduksi pengetahuan dan kebenaran, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana masyarakat berpikir dan bertindak. Dengan kata lain, ideologi negara berfungsi sebagai alat untuk menciptakan norma-norma yang diterima secara sukarela oleh masyarakat Indonesia, dengan ideologi Pancasila, menawarkan kasus yang menarik untuk dianalisis dari perspektif Foucault (Salamah & Rokhyanto, 2020). Pancasila, sebagai ideologi negara, terdiri dari lima prinsip yang mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kelima prinsip ini tidak hanya menjadi landasan hukum tetapi juga norma sosial yang mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi ideologi Pancasila sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih marak terjadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun Pancasila diakui sebagai dasar ideologis, penerapannya dalam sistem pemerintahan dan masyarakat belum sepenuhnya efektif (TINA, 2023). Dari perspektif Foucault, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep kekuasaan yang tersebar dan resistensi terhadap norma-norma yang diciptakan oleh ideologi negara. Selain itu, di era globalisasi dan informasi, ideologi negara harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Media massa dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan ideologi negara. Dalam konteks ini, analisis wacana Foucault menjadi relevan untuk memahami bagaimana ideologi negara diproduksi dan disebarluaskan melalui media. Media dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat, sehingga memperkuat atau melemahkan legitimasi ideologi negara (Komang Dea Febriantini, 2022).

Foucault juga menekankan pentingnya memahami relasi kekuasaan dalam konteks lokal dan global. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan tidak hanya berada pada level nasional tetapi juga pada level lokal. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerapkan ideologi Pancasila di tingkat lokal. Namun, sering kali terjadi ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan lokal, yang dapat menimbulkan konflik dan resistensi di masyarakat. Dalam hal ini, analisis kekuasaan Foucault membantu untuk memahami dinamika kekuasaan yang kompleks dan bagaimana ideologi negara dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai level pemerintahan (Rohman & Hanafi, 2019). Selanjutnya, dalam konteks hubungan internasional, ideologi negara juga berperan dalam menentukan posisi dan kebijakan luar negeri. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas nasional dan ideologi Pancasila di tengah tekanan global. Dalam perspektif Foucault, ideologi negara dapat dilihat sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ideologi Pancasila dapat digunakan untuk memperkuat posisi

Indonesia di panggung internasional (Rizky Amalia & Ulfatun Najicha, 2022).

Dalam penelitian ini, kita akan menjelajahi urgensi ideologi negara perspektif Foucault dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana keduanya berkorelasi dalam era kontemporer. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana ideologi negara diterapkan dalam sistem pemerintahan Indonesia dan bagaimana ia mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana ideologi negara dapat diubah dan diadaptasi untuk menjadi lebih inklusif dan efektif dalam menghadapi tantangan kontemporer. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran ideologi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia dari perspektif Foucault. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi di era kontemporer.

Dengan demikian, urgensi ideologi negara dalam konteks Indonesia di era kontemporer adalah untuk memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterapkan dalam kebijakan publik. Penting untuk terus mengkaji dan mengevaluasi implementasi ideologi negara agar tidak terjadi distorsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memahami korelasi antara ideologi negara, sistem pemerintahan, dan kontrol sosial, kita dapat memperkuat fondasi demokrasi dan keadilan dalam negara.

## 2. Metodologi

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif untuk memahami bagaimana ideologi negara perspektif Michel Foucault mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan di Indonesia. Metode deskriptif ini memungkinkan analisis yang lebih dalam dan sistematis mengenai bagaimana ideologi ini mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan (Sugiyono, 2017). Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana ideologi negara perspektif Foucault mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia.

Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk literatur akademis dan dokumen resmi pemerintahan. Literatur akademis digunakan untuk memahami teori dan konsep ideologi negara perspektif Foucault, serta bagaimana ideologi ini diterapkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Dokumen resmi pemerintahan, seperti Undang-Undang dan keputusan presiden, digunakan untuk memahami bagaimana ideologi ini diterapkan dalam praksis dan bagaimana mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan.

Dengan menggunakan data dari berbagai sumber, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana ideologi negara perspektif Foucault mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi pemerintah dan akademisi dalam memahami dan mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ideologi negara perspektif Foucault dalam mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia.

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah contoh-contoh kalimat yang memiliki unsur *hojoudoushi iku dan kuru*. Sampel yang diambil adalah kalimat yang memiliki aspek-aspek yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sampel ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data berdasarkan pada karakteristik yang terdapat pada data tersebut sebagai bagian dari subjek penelitian. Data dianalisis dengan menggunakan berbagai metode alamiah, seperti analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil analisis data digunakan untuk menjelaskan bagaimana ideologi negara perspektif Foucault mempengaruhi struktur dan dinamika pemerintahan Indonesia.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa ideologi negara, khususnya Pancasila, memainkan peran yang signifikan dalam sistem pemerintahan Indonesia (Hatta, 2015). Dari perspektif Foucault, ideologi ini tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui berbagai mekanisme kekuasaan yang tersebar dalam struktur sosial (Juanda, 2020). Penelitian ini mengidentifikasi beberapa aspek kunci di mana Pancasila berperan dalam dinamika pemerintahan dan masyarakat Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara diimplementasikan melalui konstitusi dan hukum yang menjadi dasar negara. (Pahlevi, 2016) Konstitusi Indonesia menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman utama dalam mengatur

tata kelola pemerintahan. Hal ini terlihat dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Sebagai contoh, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Ideologi Pancasila juga diwujudkan melalui institusi pendidikan, di mana nilai-nilai Pancasila diajarkan dan ditanamkan kepada generasi muda. Pendidikan Pancasila menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah, yang bertujuan untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Selain itu, institusi-institusi lainnya seperti media massa dan organisasi masyarakat juga berperan dalam menyebarkan dan memperkuat ideologi Pancasila di masyarakat (Malik et al., 2023).

Dalam konteks globalisasi dan teknologi informasi, ideologi Pancasila harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi (A Supriyatno, 2011). Media massa dan teknologi informasi memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menyebarkan ideologi negara. (Habibie, 2018) Penelitian ini menemukan bahwa media dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan yang mempengaruhi persepsi dan perilaku masyarakat, sehingga memperkuat atau melemahkan legitimasi ideologi negara.

Dalam analisis Foucault, kekuasaan tidak hanya berada pada negara atau penguasa, tetapi juga tersebar di seluruh struktur sosial. Kekuasaan bekerja melalui berbagai mekanisme dan institusi yang membentuk dan mengatur perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks ini, ideologi negara seperti Pancasila berperan sebagai wacana yang memproduksi pengetahuan dan kebenaran, yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana masyarakat berpikir dan bertindak (M Karsayuda, 2020). Dengan kata lain, ideologi negara berfungsi sebagai alat untuk menciptakan norma-norma yang diterima secara sukarela oleh masyarakat (Salamah & Rokhyanto, 2020).

Implementasi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia menunjukkan bagaimana ideologi ini berfungsi sebagai alat kekuasaan yang efektif dalam mencapai kestabilan dan ketertiban (A Andi, 2018). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa dalam praktiknya, implementasi ideologi Pancasila sering kali menghadapi tantangan. Misalnya, meskipun Pancasila diakui sebagai dasar ideologis, fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme masih marak terjadi. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara

prinsip-prinsip Pancasila dan realitas di lapangan (P Purwoko, 2013).

Dari perspektif Foucault, hal ini dapat dijelaskan melalui konsep kekuasaan yang tersebar dan resistensi terhadap norma-norma yang diciptakan oleh ideologi negara. Kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh negara atau penguasa, tetapi juga tersebar di seluruh struktur sosial. Oleh karena itu, resistensi terhadap kekuasaan dapat terjadi di berbagai level, termasuk di dalam sistem pemerintahan itu sendiri (Salamah & Rokhyanto, 2020). Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kekuasaan selalu bersifat dinamis dan berinteraksi dengan resistensi. Selain itu, dalam konteks hubungan internasional, ideologi negara juga berperan dalam menentukan posisi dan kebijakan luar negeri. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sering kali menghadapi tantangan dalam mempertahankan identitas nasional dan ideologi Pancasila di tengah tekanan global. Dalam perspektif Foucault, ideologi negara dapat dilihat sebagai alat untuk mempertahankan kedaulatan dan identitas nasional di tengah arus globalisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana ideologi Pancasila dapat digunakan untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional (Suprijanto, 2011).

Dalam konteks lokal, penelitian ini menemukan bahwa implementasi Pancasila sering kali menghadapi tantangan yang berbeda di berbagai daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menerapkan ideologi Pancasila di tingkat lokal, namun sering kali terjadi ketidakselarasan antara kebijakan nasional dan local (Waluyo, 2019). Hal ini dapat menimbulkan konflik dan resistensi di masyarakat. Analisis kekuasaan Foucault membantu untuk memahami dinamika kekuasaan yang kompleks ini dan bagaimana ideologi negara dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai level pemerintahan (Rusadi, 2015).

Selain analisis mengenai peran ideologi negara sebagai alat kekuasaan, penting juga untuk mengeksplorasi bagaimana Pancasila mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang signifikan adalah bagaimana Pancasila membentuk identitas nasional. Dalam perspektif Foucault, identitas nasional dapat dilihat sebagai hasil dari praktik diskursif yang terus menerus direproduksi melalui pendidikan, media, dan kebijakan pemerintah. Identitas nasional yang didasarkan pada Pancasila mencerminkan komitmen terhadap

nilai-nilai seperti toleransi, keadilan sosial, dan persatuan. Namun, dalam praktiknya, tantangan seperti konflik etnis dan agama menunjukkan adanya ketegangan antara ideal-ideal Pancasila dan realitas sosial (Al-Farisi, 2018). Dalam kaitannya dengan pendidikan, Pancasila telah diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional sebagai mata pelajaran wajib. Tujuan dari pendidikan Pancasila adalah untuk membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pendidikan Pancasila sering kali terbatas oleh metode pengajaran yang masih bersifat top-down dan kurang interaktif (Sianturi & Dewi, 2021). Dalam konteks ini, pendekatan Foucault tentang kekuasaan dan pengetahuan bisa digunakan untuk mengembangkan metode pengajaran yang lebih dialogis dan partisipatif, sehingga siswa tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembentukan nilai-nilai.

Selain itu, dalam konteks politik, Pancasila sering kali digunakan sebagai alat legitimasi oleh elit politik. Pemerintah dan partai politik sering merujuk pada Pancasila untuk membenarkan kebijakan-kebijakan mereka. Namun, dari perspektif Foucault, penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi ini dapat dilihat sebagai strategi untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol oposisi. Misalnya, tuduhan "tidak Pancasila" sering kali digunakan untuk mendiskreditkan kelompok atau individu yang dianggap mengancam status quo (Efriza, 2023). Oleh karena itu, penting untuk kritis terhadap bagaimana Pancasila digunakan dalam wacana politik dan memastikan bahwa penggunaan ini benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila (Ibaad et al., 2022).

Dalam konteks ekonomi, prinsip keadilan sosial dari Pancasila berusaha untuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil di masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah besar di Indonesia. Analisis Foucault tentang kekuasaan dapat membantu memahami bagaimana struktur ekonomi yang ada menciptakan dan memperkuat ketidakadilan. Misalnya, kebijakan ekonomi yang menguntungkan elit ekonomi tertentu sering kali dihasilkan dari jaringan kekuasaan yang kompleks, di mana kekuasaan dan pengetahuan digunakan untuk mempertahankan dominasi (Azis, 2015). Oleh karena itu, untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, diperlukan reformasi yang tidak hanya bersifat struktural tetapi juga diskursif, yang

mampu mengubah cara berpikir dan praktik ekonomi di masyarakat (Carolin & Novelia, 2021).

Terakhir, dalam konteks hubungan internasional, Pancasila memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan luar negeri Indonesia. Sebagai ideologi yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional, Pancasila memberikan kerangka normatif bagi diplomasi Indonesia (Budyanto, 2018). Namun, dalam praktiknya, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis yang bisa bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam analisis Foucault, kebijakan luar negeri bisa dilihat sebagai arena di mana berbagai kekuatan global berinteraksi dan bernegosiasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana Pancasila dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional, sekaligus menjaga konsistensi dengan nilai-nilai dasar yang diusungnya (Tanjung, 2015).

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang relasi kekuasaan dalam konteks lokal dan global. Dengan memahami dinamika kekuasaan yang kompleks, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam sistem pemerintahan Indonesia (Santoso, 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pengembangan sistem pemerintahan yang lebih efektif, inklusif, dan adaptif di era kontemporer.

#### 4. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengungkapkan peran penting ideologi negara, khususnya Pancasila, dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui perspektif Foucault. Dari analisis yang telah dilakukan, jelas bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar normatif tetapi juga sebagai alat strategis untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat. Melalui konstitusi, hukum, dan berbagai institusi, nilai-nilai Pancasila diintegrasikan ke dalam struktur pemerintahan dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Namun, efektivitas implementasi Pancasila masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Ideologi Pancasila telah menunjukkan perannya dalam membentuk identitas nasional dan mengarahkan kebijakan pemerintah. Pendidikan, media, dan berbagai program sosial menjadi sarana utama untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat. Namun, pendekatan yang

masih bersifat top-down dan kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat menjadi hambatan utama dalam internalisasi nilai-nilai tersebut. Pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif, sesuai dengan teori kekuasaan dan pengetahuan Foucault, diperlukan untuk memperkuat pemahaman dan penerimaan Pancasila di kalangan masyarakat luas. Dalam konteks politik, penggunaan Pancasila sebagai alat legitimasi oleh elit politik menunjukkan adanya strategi kekuasaan untuk mempertahankan dominasi dan mengontrol oposisi. Sementara Pancasila seharusnya menjadi landasan untuk kebijakan yang inklusif dan adil, praktik-praktik politik sering kali menunjukkan penyimpangan dari nilai-nilai dasar Pancasila. Untuk itu, perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan transparansi dalam implementasi kebijakan agar nilai-nilai Pancasila benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan.

Penelitian ini juga menyoroti tantangan ekonomi yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan prinsip keadilan sosial dari Pancasila. Meskipun telah ada upaya untuk menciptakan distribusi sumber daya yang lebih adil, kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Struktur ekonomi yang ada sering kali memperkuat ketidakadilan, dan reformasi struktural serta diskursif diperlukan untuk mengubah cara berpikir dan praktik ekonomi. Analisis Foucault tentang kekuasaan dapat membantu dalam memahami dan mengatasi dinamika ini dengan lebih efektif.

Terakhir, dalam konteks hubungan internasional, Pancasila memberikan kerangka normatif bagi diplomasi Indonesia yang menekankan pada perdamaian, keadilan, dan kerja sama internasional. Namun, kebijakan luar negeri yang dipengaruhi oleh pertimbangan pragmatis sering kali bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Penting untuk menggunakan Pancasila sebagai alat untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional sambil menjaga konsistensi dengan nilai-nilai dasar yang diusungnya. Pendekatan ini tidak hanya akan memperkuat legitimasi internasional Indonesia tetapi juga memastikan bahwa kebijakan luar negeri tetap sejalan dengan identitas nasional dan nilai-nilai yang dianut.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang urgensi ideologi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia melalui perspektif Foucault. Dengan mengkaji berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, serta hubungan internasional, penelitian ini menunjukkan bagaimana Pancasila

dapat diimplementasikan secara lebih efektif. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi, ideologi Pancasila memiliki potensi besar untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan harmonis.

## 5. Daftar Pustaka

- Aliano, Y. A., dan Adon, M. J. (2023). Percaturan politik geneologi kekuasaan dalam sistem pemilu '2024' di Indonesia: Perspektif etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474–486.
- Apriliyadi, E. K., dan Hendrix, T. (2021). Kajian fenomena pandemi Covid-19 di Indonesia: Perspektif wacana, pengetahuan, dan kekuasaan Foucault. *Jurnal Indonesia Maju*, 1(1), 28–48.
- Dhona, H. R. (2019). Analisis wacana Foucault dalam studi komunikasi. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 9(2), 189–208.
- Foucault, M., Canguilhem, G., Castel, R., dan Boulez, P. (2009). *Michel Foucault*. Orange Press.
- Habibie, D. K. (2018). Dwi fungsi media massa. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(2), 79.
- Hatta Mohamad, S. (2015). *Pancasila: Ideologi negara dan sistem pemerintahan*. Rajawali Press. Halaman 55-76.
- Karomani. (2004). Pengaruh ideologi terhadap wacana berita dalam media massa. *Jurnal Komunikasi Mediator*, 5(1).
- Noor, I. (2016). Islam transnasional dan masa depan NKRI: Suatu perspektif filsafat politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 10(1), 1–21.
- Pahlevi, F. S. (2016). Revitalisasi Pancasila dalam penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. *Justicia Islamica*, 13(2), 173–198.
- Karsayuda, M. (2020). Ketahanan ideologi Pancasila dalam menghadapi disrupsi revolusi industri 4.0. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 163–182.
- Salamah, U. (2015). Perspektif teori postmodern terhadap problema sosial politik kontemporer. *Media Nusa Creative* (MNC Publishing).
- Taum, Y. Y. (2020). Sastra dan politik: Representasi tragedi 1965 dalam negara orde baru. *Sanata Dharma University Press*.
- Arie, Supriyatno. (2011). Pancasila sebagai ideologi terbuka. *Edukasi Jurnal Penelitian & Artikel Pendidikan*, 3(6), 164–172.
- A, Andi. (2018). Konsep dan implementasi ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan

- pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 1(2), 77–90.
- Tilaar, H. A. R. (2003). *Kekuasaan dan pendidikan: Suatu tinjauan dari perspektif studi kultural*. IndonesiaTera.
- Turama, A. R. (2014). Pergeseran kekuasaan negara dan relasi antarsubjek dalam cerpen orde baru dan reformasi. *Jurnal Poetika*, 2.
- Al-Farisi, L. S. (2018). Politik identitas: Ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam negara Pancasila. *Jurnal Aspirasi*, 2, 77–90.
- Carolin, T. B., dan Novelia, S. (2021). *Jurnal Peduli Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, 3(September), 207–212.
- Ibaad, I., Triyana, F., dan Sukriyanto, R. (2022). Pendekatan pendidikan multikultural sebagai resolusi konflik di Indonesia. *EDUSOSHUM: Journal of Islamic Education and Social Humanities*, 2(1), 139–149. <https://doi.org/10.52366/edusoshum.v2i1.31>
- Yohana, R. U. S., dan Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1).
- Juanda, E. (2020). Eksistensi hak asasi manusia dan alternatif penyelesaian atas pelanggaran dalam negara hukum Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 98. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3290>
- Komang Dea Febriantini. (2022). Perlindungan hukum internasional terhadap warisan budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 206–213. <https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52027>
- Malik, A., Rahim, A., dan Taufiqurachman, T. (2023). Urgensi etika politik menurut Ibnu Khaldun dalam implementasinya di Indonesia. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(5), 3599–3610. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i5.2003>
- Waluyo, M. (2019). *Manajemen psikologi industri: Edisi revisi*.
- Kamarudin Salim Efriza. (2023). *Sosiologi kekuasaan teori dan perkembangan*. PT: Bumi Aksara.
- Rizky Amalia, F., dan Ulfatun Najicha, F. (2022). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi luntarnya nilai nasionalisme dan cinta NKRI di era globalisasi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1–8.
- Tanjung, S. (2015). Identifikasi strategi representasi maskulinitas pada majalah transnasional di Indonesia. *Communication*, 6(2).
- Gunawan, S. (2023). Kajian dinamika demokrasi di Indonesia untuk menjadi tokoh pahlawan daerah dan nasional RI abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224–240.
- Rusadi, U. (2015). *Kajian media: Isu ideologis dalam perspektif, teori dan metode*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Budyanto, P. S., dkk. (2018). Diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kepentingan nasional. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 8(3), 83–102.
- Rohman, Abd., dan Hanafi, Y. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153. <https://doi.org/10.33366/rfr.v9i2.1469>
- Salamah, U., dan Rokhyanto, R. (2020). Interogasi W.S. Rendra terhadap pembangunan industri era pemerintah Orde Baru: Kajian transdisipliner. *Diksi*, 28(2), 125–137. <https://doi.org/10.21831/diksi.v28i2.35038>
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suprijanto, A. (2011). Dampak globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 1(2), 100–119.
- TINA, A. (2023). Revolusi etika politik: Teori filsafat kontemporer terhadap konsep etika Ibn Sina. *Jurnal Siginjai*, 3(1), 50–65. <https://doi.org/10.22437/js.v3i1.24880>
- Yudhanegara, F. (2016). Pancasila sebagai filter pengaruh globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme. *Jurnal Ilmu Administrasi CENDEKIA*, 8(2), 165–180.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).